PROPAGANDA: AHOK TIDAK PANTAS JADI GUBERNUR

PROPAGANDA: AHOK DOES NOT DESERVE TO BE GOVERNOR

Adi Prakosa
Universitas Nasional
adiprakosa@civitas.unas.ac.id

Abdul Khodir
Universitas Nasional

ABSTRAK

Pers independen dan berita objektif adalah aturan. Namun "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget", dalam berita yang dimuat oleh Republika.co.id pada edisi Rabu, 27 Juli 2016, hal-hal yang normatif itu dilanggar. Hal inilah yang menjadi alasan untuk mengkaji wacana yang disampaikan oleh Republika on line. Metode penelitiannya menggunakan analisis wacana model Fairlcloud. Teori yang dijadikan acuan adalah Teori Kritikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita yang dikaji merepresentasikan Ahok tidak pantas jadi gubernur. Terdapat teknik propaganda yang diterapkan, yaitu nama *calling, card staking*, dan testimonial.
Kata Kunci: pers, berita, analisis wacana

ABSTRACT

Independent press and objective news are the rules. But on the news "Chairman of DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget", in news published by Republika.co.id on Wednesday, July 27, 2016 edition, normative things that are violated. This is the reason to review the discourse submitted by Republika on line. The research method uses discourse analysis of Fairlcloud model. The theory used as a reference is Critical Theory. The results show that the news reviewed represents Ahok inappropriate to be governor. There are propaganda techniques applied, namely the name calling, card staking, and testimonials.
***Keywords**: press, news, discourse analysis*

PENDAHULUAN

Berita yang disampaikan melalui media massa mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembacanya, maupun masyarakat di mana media massa itu hadir. Dengan mendapatkan informasi yang benar dari media massa, khalayak mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya maupun masyarakat dan bangsanya demi kemajuan masyarakat dan bangsa itu sendiri (Hikmat Kusumaningrat, 2007:41)

Kode etik jurnalistik memberi panduan bahwa media dituntut untuk menjaga independensi, memberikan berita yang akurat, faktual dan berimbang. Selain itu media juga dituntut untuk tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Namun pada praktiknya, masih ada media yang mengabaikannya. Media menjadi bagian dari kepentingan politik. Berita yang disampaikan jauh dari kadar obyektivitas.

Paradigma kritis mempunyai pandangan tersendiri terhadap berita, yang bersumber pada bagaimana berita diproduksi dan bagaimana kedudukan media bersangkutan dalam keseluruhan produksi berita. Paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya posisi tersebut mempengaruhi berita dan bukan cerminan dari realitas yang sesungguhnya. Paradigma kritis memandang sebuah berita tidak hanya sebuah konstruksi realitas, namun di dalamnya terdapat sebuah propaganda yang ditujukan bagi kelompok maupun individu tertentu.

Berangkat dari pemahaman tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji berita di Republika.co.id yang berjudul "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget", dalam berita yang dimuat oleh Republika.co.id pada edisi Rabu, 27 Juli 2016. Gubernur Petahana Basuki Purnama atau yang lebih akrab dikenal Ahok merupakan seorang figur yang akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan public --- media massa acap kali memberitakan isu-isu terhangat mengenai Ahok ditambah perkataan yang sering kali menuai kontorversi keluar membuat dirinya seringkali menjadi *headline* di media massa baik cetak maupun elektronik. Republika merupakan media yang tidak luput memberitakan mengenai isu-isu terhangat seorang figur Ahok, melalui media online Republika yaitu Republika.co.id

Selain pertimbangan berkenaan isi (*content*) berita, juga pertimbangan bahwa frekuensi berita Republika yang cenderung kritis terhadap Ahok cukup tinggi. Kekritisan Republika terhadap Ahok seringkali disajikan secara sepihak. Hanya menampilkan pihak yang kritis terhadap Ahok, juga menjadi sesuatu yang patut dikaji.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian analisis wacana kritis Norman Fairclough, karena titik perhatian dari konsep ini adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Selain itu karena penelitian kali ini berkaitan atau mempunyai objek adalah berita maka metode penelitian analisis wacana kritis dirasa cocok untuk mengantarkan penelitian ini. Lebih dari itu, dengan menggunakan analisis wacana kritis, penulis akan menggali lebih dalam mengenai alasan mengapa sebuah wacana memiliki struktur tertentu, yang pada akhirnya akan berujung pada analisis hubungan sosial antara pihak–pihak yang tercakup dalam wacana tersebut.

Teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu dengan menggunakan analisis yang menyeluruh. Dalam hal anailisis harus difokuskan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu.

Norman Fairclough (dalam Eriyanto, 2011: 326) dengan analisis wacana kritis mencoba menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar, dalam hal ini *sociocultural practice*. Pada tahap analisis, ketiga tahapan itu dilakukan secara bersama–sama. Analisis teks bertujuan mengungkap makna, dan itu bisa dilakukan di antaranya dengan menganalisis bahasa secara kritis. Selanjutnya *discourse practice* mengantarai teks dengan konteks sosial budaya (*sociocultural practice*). Artinya hubungan antara sosiobudayanya dengan teks bersifat tidak langsung dan disambungkan *discourse practice*. Oleh sebab itu, pada tingkatan *discourse practice* perlu melakukan wawancara mendalam dengan awak redaksi dan melakukan penelitan *news room*, dengan mengamati proses produksi berita. Ketiga dimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel: Tiga Dimensi Kerangka Analisis Norman Fairclough

TINGKATAN	METODE
Teks	*Critical linguistics*
Discourse Practice	Wawancara mendalam
Sosiocultural Practice	Studi pustaka, dan penelusuran

Sumber: Eriyanto 2011: 326

Pada teknik analisis data, penulis akan menganalisis sebuah teks pada berita *Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget* serta mengungkapkan makna – makna yang tersirat pada wacana teks berita tersebut.

Tabel: Dimensi Sosial Budaya Norman Fairclough

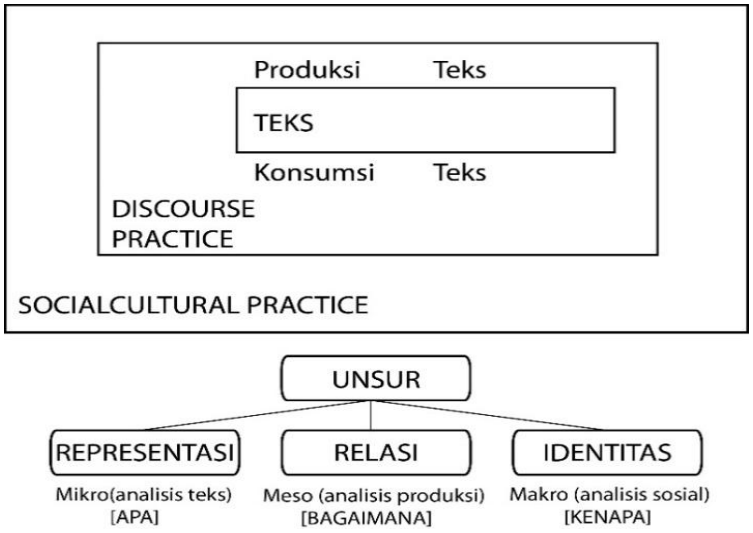

Sumber: Eriyanto, 2011: 288**.**

Teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* merupakan tiga unsur utama dalam analisis wacana yang dikemukakan oleh Norman Fairclough.

Model analisis Norman Fairclough (dalam Eriyanto, 2011: 288) menjelaskan ketiga dimensi analisisnya dalam menjalankan analisis wacana, yaitu dimensi teks, *discourse practice*, dan *socialcultural practice.*

Teori kritis adalah suatu teori yang bersikap kritis terhadap organisasi sosial yang menguntungkan orang tertentu tapi merugikan yang lain. Teori kritis percaya bahwa penelitian adalah tindakan etis dan politis yang selalu menguntungkan kelompok tertentu. Para teoretik kritik seharusnya menguntungkan mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat, karena mereka percaya bahwa masyarakat terorganisir secara tidak adil. Karena itu kaum teoritis menganjurkan bahwa penelitian harus memperkuat yang tidak punya kekuasaan (*powerless),* yang lemah menggantikan kondisi masyarakat yang penuh ketimpangan (*inequalities)* dan yang tidak adil menjadi lebih adil. (Raco, 2010: 26)

Teori kritis memberikan perhatian yang sangat besar pada alat-alat komunikasi dalam masyarakat.Komunikasi merupakan suatu hasil dari tekanan (*tension*) antara kreativitas individu dalam memberikan kerangka pada pesan dan kedala-kendala sosial terhadap kreativitas tersebut. Hanya jika individu benar-benar bebas untuk mengespresikan dirinya dengan kejelasan dan penalaran, maka pembebasan akan terjadi, dan kondisi tersebut tidak akan terwujud sampai munculnya suatu tatanan masyarakat yang baru. (Sendjaja, 1994: 393)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teks

Fairclough (dalam Eriyanto, 2011: 289) melihat teks dalam berbagai tingkatan. Sebuah teks bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimana hubungan antarobjek didefinisikan. Ada tiga elemen dasar dalam model Fairclough, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut. Menurut Fairclough, pada dasarnya setiap teks dapat diuraikan dan dianalisis dari ketiga unsur tersebut.

Tabel: Tiga Elemen Dasar dalam Teks Berita "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget"

UNSUR	YANG INGIN DILIHAT
Representasi	Ahok tidak pantas menjadi seorang pemimpin atau tidak pantas mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin.
Relasi	Adanya pola hubungan atau kedekatan antara ROL dengan Ketua DPW Gerindra DKI.
Identitas	Wartawan mengidentifikasi dirinya bagian dari kelompok Ketua DPW Gerindra DKI.

Sumber: Hasil Penelitian

Dengan menggunakan analisis teks, penulis akan meneliti level teks pada berita "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget" (Rabu 27 Juli 2016) pada situs www.republika.co.id, dan terbagi atas berikut:

Representasi

Pada tahapan dalam penelitian ini, representasi berbicara mengenai bagaimana peristiwa, orang, kelompok situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan dalam teks berita. Pada berita berita "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget" (Rabu 27 Juli 2016) pada situs www.republika.co.id, dalam naskah tersebut memberitakan mengenai pendapat ketua DPW DKI Gerindra yang menyebut Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai pribadi yang tidak mencerminkan budaya indonesia. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan; semenjak Basuki Tjahja Purnama alias Ahok keluar dari fraksi partai Gerindra, ia mengalami perubahan sikap menjadi arogan dan tidak beradab.

Jika merujuk pada nilai layak berita, keakuratan suatu fakta tidak selalu menjamin arti. Fakta-fakta akurat yang dipilih atau disusun secara longgar atau tidak adil sama menyesatkannya dengan kesalahan yang sama sekali palsu. Dengan terlalu banyak atau sedikit memberikan tekanan, dengan menyisipkan fakta-fakta yang tidak relevan, dengan menghilangkan fakta-fakta yang seharusnya ada di sana, pembaca mungkin mendapat kesan yang palsu. Dalam hal ini penulis melihat adanya sebuah tekanan terhadap figur Ahok. Dalam berita tersebut naskah hanya menjelaskan mengenai pendapat Ketua DPW Gerindra DKI mengenai pribadi Ahok yang cenderung negatif.

Sementara dari pihak atau kubu Ahok sendiri dalam berita tersebut tidak sama sekali diberitakan, atau memberikan *statement.* Hal tersebut mengisyaratkan bahwa naskah dalam berita terkesan berat sebelah dan hanya memberi tekanan terhadap pribadi Ahok.

Dengan pemakaian kata seperti tak beradab, arogan serta *Enggak Indonesia banget*, perubahan sikap Ahok semenjak keluar dari Gerindra dimaknai sebagai perubahan sikap yang cenderung kearah negatif serta mendiskriminasikan Ahok. Sebaliknya akan menjadi berbeda dalam kata Ahok semenjak keluar dari Gerindra berubah sikap menjadi tegas, serta tidak beradab. Dalam hal ini penulis mensejajarkan sikap Ahok yang arogan serta tidak beradab dengan "tegas" serta "tidak pandang bulu", sebagaimana yang sering kita lihat di media perkataan – perkataan Ahok yang *ceplas–ceplos*, terutama terhadap bawahannya yang tida disiplin terhadap aturan maupun masyarakat yang tidak tunduk dengan aturan. Hal tersebutl di atas telah memunculkan anggapan bahwa Ahok cenderung arogan dan tak beradab, namun, di samping itu kita tentu tidak mengkesampingkan fakta bahwa sikap tersebut mencerminkan tindakan yang tegas serta tidak pandang bulu terhadap bawahannya serta masyarakat yang melanggar peraturan.

Jadi, hal yang menarik di sini bukan hanya bagaimana pilihan kata yang digunakan dalam menggambarkan realitas tentang Ahok yang berbeda, tetapi juga bagaimana realitas terhadap Ahok yang sama dapat dibahasakan secara berbeda. Dalam berita yang dimuat oleh Republika.co.id perubahan sikap Ahok dapat direpresentasikan sebagai perubahan sikap yang negatif dan hal tersebut tidak cocok untuk seorang pemimpin seperti Ahok.

Tabel: Perbedaan Realitas yang Digambarkan pada Teks Berita "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget"

Tak beradab	Tidak mempunyai mempunyai budi bahasa yang baik
Arogan	Mempunyai perasaan yang superioritas
Tegas	Pasti, tidak ragu–ragu dan jelas
Tidak Pandang bulu	Tidak membeda–bedakan

Sumber: Hasil Penelitian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

Relasi

Jika representasi berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang, kelompok, kegiatan, tindakan, keadaan atau sesuatu ditampilkan dalam teks, maka relasi berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Fairclough (dalam Eriyanto 2011, 299) berpendapat; bahwa ada tiga kategori partisipan utama dalam suatu media; *wartawan* (reporter atau redaktur), *khalayak media*, dan *partisipan publik* (politisi, pengusaha, tokoh masyarakat). Titik perhatian dari analisis hubungan atau relasi bukan pada representasi mengenai representasi mengenai partisipan publik, melainkan mengungkap pola hubungan antara ketiga aktor tadi disampaikan di dalam teks.

Tabel: Gambaran *Partisipan Publik*

Teks Berita	
Ketua DPW DKI (*Partisipan publik*)	Ketua DPW DKI Gerindra Muhammad Taufik menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai sosok yang baik ketika masih menjadi kader partai Gerindra."Enggak begitu, senyum, baik-baik. Baik-baik banget. Sikapnya juga baik," katanya, Selasa (26/7).Taufik mengatakan sikap Ahok mengalami perubahan usai keluar dari Gerindra. Ia menilai Ahok makin tak beradab dengan sikapnya yang arogan."Sejak keluar dari rel-rel keadaban. Sejak Ahok tidak beradab. Semua dong, kan saya bilang orang lapor dituding maling, orang datang dibentak-bentak. Dengan arogannya dipertontonkan

	publik. Enggak Indonesia banget," ujarnya. Lebih lanjut, Taufik mengakui Ahok menuduhnya mengkoordinir aksi demonstrasi yang terjadi di Balai Kota. Ia membantah tudingan itu dengan beralasan bahwa setiap rakyat berhak menyatakan pendapat di Balai Kota."Kalau itu kan Ahok sering nuduh orang kan sering, jadi enggak usah kaget lah," ucapnya.

Sumber: Hasil Penelitian

Dalam teks berita di atas, penulis melihat bahwa berita lebih menempatkan hubungan dengan Ketua DPW Gerindra DKI. Hal tersebut terlihat dengan dominannya pernyataan Ketua DPW Gerindra DKI yang mengomentari kepribadian Ahok. Dalam berita tersebut penulis menemukan adanya pola hubungan atau kedekatan antara ROL dengan Ketua DPW Gerindra DKI. Hal tersebut tercermin dari bagimana ROL memberikan ruang kepada Ketua DPW Gerindra DKI yang notabene berseberangan dalam hal politik untuk mengutarakan pendapatnya dan mengomentari sikapnya terhadap Ahok, sementara, ruang yang sama tidak diberikan terhadap Ahok.

Identitas

Fairclough (dalam Eriyanto, 201: 230) melihat bagaimana aspek identitas wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Menurut Fairclough, dari sini kita dapat melihat serta mengidentifikasi posisi atau bagian dari kelompok mana wartawan itu berada. Apakah wartawan tersebut lebih mengidentifikasikan dirinya bagian dari khalayak atau mandiri. Dari wacana pada berita ROL yang berjudul "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget", kita bisa menganalisis apakah wartawan menempatkan diri sebagai bagian dari Ketua DPW Gerindra DKI, Ahok, atau mandiri

Tabel: Identifikasi

Teks Berita	
Identifikasi dengan Ketua DPW Gerindra DKI	Taufik mengatakan sikap Ahok mengalami perubahan usai keluar dari Gerindra. Ia menilai Ahok makin tak beradab dengan sikapnya yang arogan. Lebih lanjut, Taufik mengakui Ahok menuduhnya mengkoordinir aksi demonstrasi yang terjadi di Balai Kota. Ia membantah tudingan itu dengan beralasan bahwa setiap rakyat berhak menyatakan pendapat di Balai Kota.

Sumber: Hasil Penelitian dan www.Republika.co.id

Dalam teks berita tersebut, kita dapat mengidentifikasi bahwa wartawan dari ROL merupakan bagian dari kelompok Ketua DPW Gerindra DKI. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana identitas seorang wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Di sini penulis melihat bahwa wartawan lebih fokus terhadap pernyataan yang diutarakan oleh Ketua DPW Gerindra DKI kepada Ahok, ia bahkan mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok yang berlawanan dengan Ahok sebagaimana wacana yang ditampilkan dalam teks berita kepada khalayak.

Discourse Practice

Menurut Bilal Ramadhan selaku redaktur pada berita "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget", sebelum reporter terjun langsung kelapangan akan ada arahan–arahan khusus yang diberikan redaktur terhadap reporter berkenaan dengan penentuan narasumber tertentu, *angle* berita dan juga isu yang ingin diangkat. Seperti berikut hasil wawancara dengan Bilal Ramadhan selaku redaktur berita pada berita "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget".

> *"Kita redaktur memberikan isu–isu yang terkini atau angle–angle yang biasanya kita kejar yang lebih update, terutama kita ngomongin online, biasanya malemnya kita kasih agenda terus kemudian arahan–arahan penentuan narasumber, angle berita, serta pertanyaan–pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber. Jadi pas hari H reporter mulai mencari berita kita tinggal nunggu berita yang sudah dikirim oleh reporter ke kantung berita, jadi kita tinggal ngambil berita dari kantung berita. Biasanya kita mengarahkan reporter–reporter dalam sebuah acara untuk mengejar narasumber yang mana, terkait dengan agenda, dan peristiwa–peristiwa yang lagi hits atau yang update. Biasanya dari reporternya sendiri udah tau, harus nyari isu mengenai apa, dan harus mendapatkan narasumbernya siapa. Karena kalau reporter biasanya sudah mempunyai sense of news di lapangan, lebih mengetahui kondisi lapangan seperti apa. Selain itu koordinasi penting, semisal narasumber ini tidak ingin diwawancara."* – Bilal Ramadhan (Redaktur ROL).

Berkenaan dengan berita ROL yang berjudul "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget" dalam proses praktik wacana, penulis melihat bahwa redaktur mengkontrol secara penuh dan hal tersebut tidak terlepas dengan adanya arahan–arahan khusus yang diberikan oleh redaktur terhadap reporter berkaitan dengan narasumber serta pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Dalam hal ini Muhammad Taufik yang menjabat sebagai Ketua DPW Gerindra DKI.

Untuk penentuan judul, Bilal selaku redaktur mengatakan tujuan pengambilan kutipan Ketua DPW Gerindra DKI sebagai judul adalah untuk menghindari kritikan netizen serta membentengi berita tersebut dari jerat

hukum. Hal tersebut dikatakan Bilal Ramadhan dalam wawancara sebagai berikut:

> *"Karena menurut saya, nyari judul dikutipan bisa kuat secara hukum. Kan selama ini sebuah berita kalau sudah sampai ke online, netizen yang baca itu bisa bilang ini beritanya melintir dan tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Kalau saya mengambil judul dari kutipan itu kan merupakan kutipan langsung, dan netizen atau khalayak yang membaca tidak bisa membantah, jadi saya selalu membiasakan diri kalau memang ada kutipan–kutipan yang enak buat dibaca atau enak diliat, saya selalu jadikan judul. Dibandingkan kita meringkas suatu berita dan kita buat judul sendiri itu bisa membuat penafsiran orang berbeda–beda. Selain itu penentuan kutipan sebagai judul adalah untuk menghindari pertanyaan–pertanyaan dari khalayak atas kevaliditasan berita tersebut, apalagi isu mengenai Ahok itu sensitif, pendukungnya banyak, yang kontra juga banyak."* – Bilal Ramadhan (Redaktur ROL).

Dalam wawancara tersebut Bilal beranggapan; penggunaan kutipan langsung sebagai berita adalah untuk menghindari pertanyaanpertanyaan dari khalayak berkenaan dengan validnya sebuah berita. Terutama tentang Ahok yang menurut Bilal Ramadhan adalah sesuatu hal yang sensitif. Namun penulis menggaris bawahi bagaimana ROL melihat sebuah pernyataan dengan kenyataan, karena pernyataan dari Ketua DPW Gerindra DKI belum tentu sebuah kenyataan berkenaan dengan perubahan sikap Ahok setelah keluar dari Gerindra. Jika pernyataan tersebut tidak atau berpaling dari kenyataan, maka, hal tersebut justru melunturkan kevaliditasan berita itu sendiri.

Penentuan Ketua DPW Gerindra DKI yang notabene "berseberangan" dengan Ahok, sejatinya, adalah merupakan salah satu bentuk kritik bahkan berbau propaganda yang dilancarkan olehnya yang dengan secara tajam menyoroti sikap Ahok selama menjadi Gubernur dan setelah keluar dari Partai Gerindra.

> *"Berita tersebut latar belakangnya ada pertikaian antara Ahok di sini dalam artian sebagai Gubernur DKI dengan DPRD DKI. Saat itu banyak pertikaian terjadi antara Ahok dengan DPRD. Baik itu dengan Muhammad Taufik atau yang lain seperti Lulung dan beberapa anggota lainnya. Hubungan Ahok dengan anggota DPRD yang tidak harmonis, salah satunya kasus Sumber Waras, dan masalah–masalah penggusuran. Boleh dikata, pada saat itu DPRD selalu berlawanan dengan Ahok yang masih menjabat sebagai gubernur. Dan yang kali ini kalo saya melihat diberita itu Taufik sebagai ketua DPW Gerindra sebagai oposisi darimana ia menunjukan sikapnya terhadap kebijakan-kebijakan Ahok yang menurutnya tidak berpihak terhadap rakyat kecil, salah satunya adalah penggusuran–penggusuran; seperti Kali Ciliwung, dan Kali-jodoh. Yang terakhir ramaiadalah penggusuran di Pasar Ikan yang polemiknya menjadi besar dengan adanya perkampungan muslim serta Masjid Luar Batang masjid tua yang memiliki historis. Makanya pas reporter bikin berita tentang Muhammad Taufik dan ada kutipan bagus, ya saya jadikan*

sebagai judul. Karena kan memang kalau di berita online penentuan judul sangat penting, terutama dalam meraih viewers kalo di online." – Bilal Ramadhan (Redaktur ROL).

Secara historis, apa yang dikatakan oleh Redaktur ROL ketika diwawancarai, Ahok dan Ketua DPW Gerindra DKI mempunyai hubungan yang tidak harmonis. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi. Pihak DPRD ataupun DPW yang diketuai oleh Muhammad Taufik selalu bertentangan terhadap kebijakan –kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penulis melihat jika Ketua DPW yang notabene "bertentangan" dengan Ahok, ketika dimintai pendapat mengenai sosok Ahok, maka, pendapat yang keluar dari Ketua DPW cenderung subjektif. Selain itu, penulis melihat adanya "kesengajaan" dari Redaktur yang memiliki kontrol terhadap tersebarnya berita tersebut untuk memilih atau menyetujui Ketua DPW Gerindra DKI sebagai narasumber tunggal dalam berita tersebut.

"*Dan kenapa Taufik, karena sebelumnya kita tahu kalau Ahok berselisih atau berlawanan arus dengan Taufik dan Lulung. Apalagi Lulung selalu perang kata–kata dengan Ahok, di DPRD setau saya hanya dua itu saja. Jadi kalau ada program–program atau kebijakan Ahok, kita akan meminta komentar dari yang mendukung atau yang anti dengan kata lain yang tidak setuju. Dan bagian yang tidak setujunya itu si Taufik. Setelah itu kita akan cari dari kubu PDIP yang mendukung Ahok dengan Jokowi. Jadi untuk berita ini kita minta Taufik dan kalau misalkan Lulung nanti juga kita pasti bikin karena selain faktor narasumber kita juga mempertimbangkan faktor media daring.*" – Bilal Ramadhan (Redaktur ROL).

Pada tingkat produksi, baik secara sengaja maupun tidak, penulis juga melihat bahwa di dalam teks terkandung propaganda.. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Ketua DPW Gerindra DKI yang bernada *provokatif*, jika pun pada berita tersebut memang mengandung unsur propaganda, maka, dapat diartikan bahwa Ketua DPW Gerindra DKI-lah yang menyebar propaganda, karena ia merupakan narasumber tunggal pada berita tersebut. Hal itu juga diungkapkan oleh Rizky Suryarandika selaku reporter yang menulis berita tersebut seperti di bawah ini:

"*Mengenai apakah berita tersebut mengandung unsur propaganda atau tidak, tentu perlu dikembalikan lagi pada apa saja sebenarnya unsur propaganda?. Saya selaku reporter hanya bertugas menyampaikan fakta, dalam hal ini yaitu pernyataan M.Taufik. Jika berita ini dipandang mengandung unsur propaganda, tentu seharusnya dapat diartikan pula M. Taufik menyebar propaganda karena dialah yang menjadi narasumber berita.*" – Rizky Suryarandika (Reporter ROL).

Sebagaimana kita ketahui, pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua DPW Gerindra DKI yang menyebutkan bahwa sikap Ahok yang tidak beradab dan arogan, setelah keluar dari Partai Gerindra tersebut terbilang *provokatif*, dan hal

tersebut akan memicu respon di masyarakat mengingat belakangan Ahok adalah merupakan sosok yang amat kontroversi.

Selanjutnya, dalam tingkatan *discourse practice* aspek individu dari wartawan maupun redaktur menjadi sangat penting karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap bagaimana teks berita itu diproduksi. Seperti dalam wawancara yang dilakukan terhadap Bilal Ramadhan selaku redaktur berita, ia berpendapat bahwa Ahok merupakan sosok yang tidak pro terhadap rakyat miskin. Hal tersebut tercermin dari tidak seriusnya pemerintah DKI memindahkan rakyat miskin yang terkena program penggusuran. Sementara Rizky Suryarandika selaku reporter yang diwawancarai pada tempat berbeda beranggapan; Ahok adalah merupakan sosok yang kontroversial. Pada satu sisi reporter beranggapan Ahok mempunya sikap disiplin tinggi serta bertanggung jawab terhadap tugas, namun, di sisi lain ia juga beranggapan Ahok mempunyai sikap yang kurang santun ditambah dengan perdebatan perbedaan suku, dan agama yang masih terus berkelindan di khalayak.

> *"Terlepas dari semua kabar negatif maupun positif tentang Ahok yang belum bisa dipastikan kebenarannya, saya memandang Ahok sebagai tokoh kontroversial. Faktanya, Ahok bisa dianggap sebagai salah satu Gubernur yang banyak menyumbang pembangunan Jakarta. Kerjanya yang sudah terealisasi yaitu Rusunawa, KJP, pasukan orange, pasukan biru, RPTRA, bersihnya pintu air Manggarai, penambahan armada Transjakarta, peningkatan fasilitas disabilitas dan Ahok bersedia menerima segala macam laporan warganya langsung di kantornya setiap pagi hari. Sepengetahuan saya, Ahok nyaris selalu datang jam 07.30 di Balai Kota dan pulang lagi sekitar pukul 18.00-19.00 WIB. Saya memandang tidak banyak kepala daerah yang rela menghabiskan hampir semua waktunya untuk bekerja di kantor. Di sisi lain, banyak pihak mencela Ahok karena ucapan dan sikapnya yang dianggap kurang santun. Bahkan ada pula pembenci Ahok karena alasan perbedaan suku dan agama."* – Rizky Suryarandika (Reporter ROL).

Dari paparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ROL merepresentasikan Ahok tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin atau maju kembali sebagai pemimpin pada berita yang berjudul "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget".

Sociocultural Practice

Sebagaimana kita ketahui, analisis *sociocultural practice* didasarkan pada asumsi bahwa kondisi sosial yang berada di luar media di mana yang bersangkutan dapat mempengaruhi bagaimana wacana itu terbentuk dan muncul di dalam media. Dalam hal ini *sociocultural practice* tidak langsung berhubungan dengan produksi teks, tetapi menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi dan dapat dipahami.

Menurut Fairclough (dalam Eriyanto, 2011: 289) cara kerja *sociocultural practice* dalam menentukan yang akan diproduksi, tidak secara langsung melainkan dimediasi atau melalui *discourse practice*. Di mana dengan melalui *discourse practice* nantinya akan muncul analisis *sociocultural practice*. Namun penulis tegaskan, bahwa *sociocultural practice* bukanlah merupakan unsur di dalam *discourse practice*, hanya saja, untuk mencapai ranah produksi teks *sociocultural practice* perlu media (*discourse practice)*.

Semisal masyarakat Indonesia mempunyai ideologi Pancasila yang di dalamnya terdapat moto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, namun tidak dipungkiri masih ada beberapa lapisan masyarakat/kelompok yang masih memiliki sentimen pada agama atau ras tertentu. Kondisi di dalam masyarakat yang seperti inilah yang bisa mempengaruhi teks berita diproduksi dan dipahami, apakah dalam berita tersebut dikatakan menyudutkan kaum minoritas, atau sebaliknya --- atau bahkan justru tetap dijalur netral --- itu semua tergantung pada kondisi di lingkungan sosial masyarakat yang berada di luar media.

Berawal dari sentimen agama ataupun ras yang melatar belakangi proses produksi teks tersebut, khususnya dalam berita di ROL yang berjudul "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok enggak Indonesia banget",. Walau tidak secara gamblang disebutkan dalam teks tersebut, namun, ungkapan Ketua DPW Gerindra DKI yang menilai negatif seakan menegaskan bahwa ia ingin mempengaruhi khalayak untuk mulai berpaling dari Ahok. Kenyataan itu dipertegas dengan menyebut bahwa Ahok pribadi yang tidak beradab, memiliki sikap yang arogan. Kata *enggak Indonesia banget* merepresentasikan bahwa Ahok tidak pantas untuk menjadi pemimpin di Indonesia, khusunya Jakarta.

Berangkat dari pandangan paradigma kritis melihat sebuah media bukan hanya alat dari kelompok dominan, akan tetapi, juga memproduksi ideologi dominan, dibuktikan dengan kemampuan media menyebarluaskan gagasan kelompok dominan. Lewat media, ideologi dominan, apa yang baik dan apa yang buruk dikonstruksikan dalam sebuah berita. Oleh sebab itu, titik penting dalam memahami media menurut paradigma kritis adalah bagaimana media melakukan politik pemaknaan, karena, pada dasarnya media massa tidak mereproduksi, melainkan menentukan realitas melalui pemakaian kata–kata yang terpilih.

Atas dasar tersebut, maka, penulis melihat adanya praktik propaganda pada berita yang dimuat oleh ROL yang berjudul "Ketua DPW Gerindra DKI: Ahok Enggak Indonesia Banget". Dalam hal ini, bagaimana ROL mengkonstruksikan realitas kedalam berita yang cenderung lebih condong terhadap pendapat Ketua DPW Gerindra DKI yang menggunakan konotasi negatif terhadap Ahok.

SIMPULAN

ROL merupakan media massa yang melakukan propaganda menyudutkan Ahok dengan cara memberikan ruang kepada Ketua DPW Gerindra DKI untuk menyampaikan pendapatnya terkait Ahok.

Hal tersebut di atas tampak dalam pemberian julukan (*name calling*) yang merepresentasikan bahwa Ahok tidak layak sebagai pemimpin Indonesia, kemudian tebang pilih (*card sataking*), fakta dan data menunjukkan konotasi negatif dengan mengesampingkan fakta-fakta yang positif tentang Ahok.

Epresentasi di atas diperkuat dengan kesaksian (testimonial), Muhammad Taufik, selaku Ketua DPW Gerinda DKI yang memberikan pendapat yang berkonotasi menjelek-jelekkan Ahok dengan tujuan untuk meyakinkan publik bahwa Ahok memang tidak pantas menjadi pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Budyatna, Muhammad. 2009. *Jurnalistik Teori & Praktik*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya

Merril, John C. 1997. *Journlaisme Ethics – Philosophical Foundations For News Media*. New York; St. Martin's Press

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Media*. Yogyakarta; LKis Group

Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press

Haryanto, Ignatius. 2014. *Jurnalisme Era Digital*. Jakarta: Kompas

Littlejohn, Stephen W. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat Purnama. 2007. *Jurnalistik Teori & Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mulyana, Dedi. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode Aplikasi, dan Prinsip–Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta

Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode – Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar – Ruzz Media.

Republika.co.id edisi, Rabu, 27 Juli 2016, 01.00WIB

TENTANG PENULIS

Adi Prakosa, merupakan dosen tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nasional. Menempuh sarjana strata 1 di Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dan strata 2 magister Ilmu Komunikasi di universitas yang sama. Beberapa hasil penelitiannya antara lain *Konstruksi Terhadap Kampanye Pemilu Presiden 2009 (Analisis Framing terhadap Berita Kampanye Terbuka Pemilu Presiden 2009 di Surat Kabar Media Indonesia, Kompas, Suara Pembaruan, Republika, Seputar Indonesia dan Koran Tempo Edisi 14 Juni – 5 Juli)*, dibiayai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan *Agenda Media Cetak Terhadap Rencana Pemerintah Menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Analisis Framing terhadap Berita-Berita Surat Kabar Media Indonesia, Kompas, Suara Pembaruan, Republika, dan Koran Tempo Menyoal Rencana Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2008)*, dibiayai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.